



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya disusun dan disajikan sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Pada dasarnya Laporan Keuangan merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya yang menginformasikan kepada pihak yang terkait, yaitu para pengguna kepentingan (*stakeholder*) yang ada, tentang kondisi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kota Palangka Raya yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum.

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan atau sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya;
- g. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya;
- h. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);
- i. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1)
- j. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023;

1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.1.1. Pendapatan - LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Pendapatan - LO
 - 3.1.4. Beban
 - 3.1.5. Aset
 - 3.1.6. Kewajiban
 - 3.1.7. Ekuitas Dana

- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bab V. Penutup.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**2.1.1. Pendapatan.**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak mempunyai pendapatan.

2.1.2. Belanja**2.1.2.1. Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp4.538.989.093,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
		2023	2023		
1	Belanja Pegawai	3,553,567,545.00	3,222,776,420.00	330,791,125.00	90.69
2	Belanja Barang dan Jasa	1,333,312,639.00	1,316,212,673.00	17,099,966.00	98.72
	JUMLAH	4,886,880,184.00	4,538,989,093.00	347,891,091.00	92.88

Rincian Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.538.989.093,00 tertuang pada lampiran LRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya 2023.

2.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 2023 sebesar Rp334.227.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
		2023	2023		
1	BM Peralatan Dan Mesin	350,469,500.00	334,227,500.00	16,242,000.00	95.37
2	BM Bangunan dan Gedung	0.00	0.00	0.00	
3	BM Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH	350,469,500.00	334,227,500.00	16,242,000.00	95.37

Rincian Realisasi Modal sebesar Rp334.227.500,00 tertuang pada lampiran LRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya 2023.

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Untuk kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada dasarnya tidak ada kendala dan hambatan yang berarti. Hampir Sebagian besar sesuai dengan target yang sudah ditentukan kecuali untuk sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 90,69% atau Rp3.222.776.420,- dikarenakan adanya anggaran gaji dan tunjangan Eselon II, Eselon III, dan pejabat Fungsional (yang beralih dari Eselon IV ke Jabatan Fungsional tertentu yang belum

terrealisasikan serta ASN yang Pensiun dan Mutasi sehingga menyebabkan realisasi tidak maksimal.

2. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang dengan capaian 94,98% atau Rp300.600.000.- dikarenakan harga dari Pihak Penyedia lebih rendah dari pada yang di anggarkan pada DPA sehingga terdapat sisa anggaran.
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 94,09% terealisasi Rp126.760.323.- untuk Tagihan Air kerana anggarannya tidak cukup (kurang) jadi tidak bisa terbayarkan tagihan sesuai dengan invoice pembayaran dan untuk Tagihan Internet karena adanya pemakaian listrik yang turun atau naik sehingga ada kelebihan anggaran pembayaran listrik.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 96,04% terealisasi Rp113.013.050.- untuk Bahan-bahan Bakar dan Pelumas kerana adanya beberapa kali mengalami perubahan harga turunya karena perliter maka anggaran BBM ada kelebihan anggaran dan untuk Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan kerana ada kesalahan melebihi perhitungan anggaran untuk bayar pajak, bea dan perizinan roda 4 sehingga anggaran jadi tersisa.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan dibawah ini akan disajikan sesuai dengan Pagu Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya. Dibawah ini akan disajikan sesuai dengan data sesungguhnya.

3.1.1. Pendapatan - LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya adalah sebesar Rp0,00.-

3.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya 2023 sebesar Rp4.873.216.593,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI PER 31	REALISASI PER 31	LEBIH/KURANG	%
		DESEMBER 2023	DESEMBER 2022	(Rp)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Pegawai	3,222,776,420.00	3,376,864,371.00	(154,087,951.00)	104.78
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,895,381,730.00	2,025,276,404.00	(129,894,674.00)	(6.41)
	Belanja Tambahan Penghasilan	1,192,514,690.00	1,221,167,967.00	(28,653,277.00)	(2.35)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	134,880,000.00	130,420,000.00	4,460,000.00	3.42
2	Belanja Barang dan Jasa	1,316,212,673.00	1,612,328,782.00	(296,116,109.00)	(18.37)
	Belanja Barang	312,971,955.00	369,976,300.00	(57,004,345.00)	(15.41)
	Belanja Jasa	621,077,219.00	700,366,772.00	(79,289,553.00)	(11.32)
	Belanja Pemeliharaan	63,650,000.00	50,730,000.00	12,920,000.00	25.47
	Belanja Perjalanan Dinas	318,513,499.00	487,605,710.00	(169,092,211.00)	(34.68)
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00	0.00	-	0.00
3	Belanja Modal	334,227,500.00	1,150,504,825.00	(816,277,325.00)	(70.95)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334,227,500.00	873,183,795.00	(538,956,295.00)	(61.72)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	755,007,350.00	(755,007,350.00)	(100.00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	118,176,445.00	(118,176,445.00)	(100.00)
	JUMLAH	4,873,216,593.00	6,139,697,978.00	(1,266,481,385.00)	(20.63)

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya 2023 Rp5.429.000.000.- dengan rincian sebagai berikut :

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	PENDAPATAN - LO	5,429,000,000.00	160,096,164.00	5,268,903,836.00	3,291.09
	Pendapatan Hibah-LO	5,429,000,000.00	160,096,164.00	5,268,903,836.00	3,291.09

3.1.4. Beban

Beban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya 2023 Rp4.536.819.893.- dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	SALDO TAHUN 2023 (Rp)			KETERANGAN	
	LRA	LO	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Gaji Pokok ASN	1,402,710,200.00	1,402,710,200.00	0.00		
Beban Tunjangan Keluarga ASN	13,142,225.00	13,142,225.00	0.00		
Beban Tunjangan Jabatan ASN	95,255,000.00	95,255,000.00	0.00		
Beban Tunjangan Fungsional ASN	29,214,470.00	29,214,470.00	0.00		
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	36,025,000.00	36,025,000.00	0.00		
Beban Tunjangan Beras ASN	82,269,120.00	82,269,120.00	0.00		
Beban Tunjangan P Ph/Tunjangan Khusus ASN	3,491,445.00	3,491,445.00	0.00		
Beban Pembulatan Gaji ASN	18,847.00	18,847.00	0.00		
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	103,376,726.00	103,376,726.00	0.00		
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,899,668.00	2,899,668.00	0.00		
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8,699,002.00	8,699,002.00	0.00		
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,192,514,690.00	1,192,514,690.00	0.00		
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	126,720,000.00	126,720,000.00	0.00		
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00		
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00		
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57,905,850.00	57,905,850.00	0.00		
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25,049,850.00	25,049,850.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22,162,600.00	22,162,600.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44,987,355.00	44,987,355.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15,754,000.00	15,754,000.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6,129,300.00	5,580,100.00	549,200.00	Reklas ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)	549,200.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,535,200.00	1,535,200.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1,662,600.00	1,662,600.00	0.00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,858,800.00	12,683,800.00	-6,825,000.00	Reklas ke Ekstracometable	6,825,000.00
Beban Natura dan Pakan-Natura	960,000.00	960,000.00	0.00		
Beban Makanan dan Minuman Rapat	117,541,400.00	117,541,400.00	0.00		
Beban Pakaian Adat Daerah	4,975,000.00	4,975,000.00	0.00		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36,640,000.00	36,640,000.00	0.00		
Beban Honorarium Rohaniwan	700,000.00	700,000.00	0.00		
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00		
Beban Jasa Tenaga Administrasi	258,060,000.00	258,060,000.00	0.00		
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	114,247,500.00	114,247,500.00	0.00		

URAIAN	SALDO TAHUN 2023 (Rp)			KETERANGAN	
	LO	LRA	Perbedaan	Uraian	Jumlah
Beban Jasa Tenaga Keamanan	0.00	0.00	0.00		
Beban Jasa Tenaga Supir	21,390,000.00	21,390,000.00	0.00		
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0.00	0.00	0.00		
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00		
Beban Jasa Pengolahan Sampah	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
Beban Tagihan Telepon	0.00	0.00	0.00		
Beban Tagihan Air	34,219,070.00	34,219,070.00	0.00		
Beban Tagihan Listrik	88,658,603.00	88,658,603.00	0.00		
Beban Langganan Juma/Surat Kabar/Majalah	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,882,650.00	3,882,650.00	0.00		
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6,077,200.00	6,077,200.00	0.00		
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22,776,704.00	22,776,704.00	0.00		
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,905,492.00	1,905,492.00	0.00		
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00		
Beban Sewa Alat Musik	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
Beban Bimbingan Teknis	0.00	0.00	0.00		
Beban Diklat Kepemimpinan	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38,990,000.00	38,990,000.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8,040,000.00	8,040,000.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4,380,000.00	4,380,000.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00		
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	204,999,579.00	204,999,579.00	0.00		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	87,050,000.00	87,050,000.00	0.00		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26,463,920.00	26,463,920.00	0.00		

3.1.5. Aset

3.1.5.1 Aset Lancar

	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 Rp0,00.-		
	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Terdapat saldo pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp0,00.-		
	2023	2022

	(Rp)	(Rp)
3. Piutang	0,00	0,00
Saldo Piutang 2023 Rp0,00.-	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
4. Piutang Lainnya	0,00	0,00
Saldo Piutang Lainnya 2023 Rp0,00.-	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
5. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
6. Persediaan	0,00	0,00

3.1.5.2 Aset Tetap

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset Tetap	13.109.675.681,09	8.032.255.781,09

Saldo aset tetap 2023 sebesar Rp. terdiri dari :

1. Tanah	2023	2022
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.501.000.000,00	72.000.000,00
JUMLAH ASET TETAP TANAH	5.501.000.000,00	72.000.000,00

2. Peralatan dan Mesin	2023	2022
Alat Angkutan Darat Bermotor	615.949.855,00	665.462.189,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	673.251,11	673.251,11
Alat Kantor	838.172.150,00	833.670.150,00
Alat Rumah Tangga	1.229.588.419,02	1.218.738.719,02
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	147.617.000,00	147.617.000,00
Alat Studio	30.326.089,80	30.326.089,80
Alat Komunikasi	12.120.000,00	12.120.000,00
Komputer Unit	422.916.103,94	410.916.103,94
Peralatan Komputer	217.203.882,35	217.203.882,35
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	3.514.566.751,22	3.536.727.385,22

3. Gedung dan Bangunan	2023	2022
Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.397.300.837,00	7.397.300.837,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	23.752.000,00	23.752.000,00
JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN	7.421.052.837,00	7.421.052.837,00

4. ASET TETAP LAINNYA	2023	2022
Bahan Perpustakaan Tercetak	280.673.780,90	280.673.780,90
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA	280.673.780,90	280.673.780,90

5. Akumulasi Penyusutan	2023	2022
Akumulasi Penyusutan	-3.672.640.027,02	-3.425.960.957,02
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-3.672.640.027,02	-3.425.960.957,02

Keterangan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Berikut :

MUTASI TAMBAH

KIB	Barang Inventaris	Jenis Mutasi	Mutasi	Keterangan
A	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	HIBAH	5,429,000,000.00	Hibah dari Kantor Penerangan Pusat Rp 5.429.000.000
B	MEUBELAIR	REKLAS	6,245,000.00	Reklas + dari Alar Penyimpanan Perlengkapan kantor Rp 6.245.000
B	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	REKLAS	2,169,200.00	Reklas + dari Persediaan - Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor (Tempat Sampah) Rp 2.169.200
B	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	REKLAS	300,600,000.00	Rekla + dari Kendaraan Bermotor Penumpang Rp 300.600.000
-	EKSTRAKOM KIB B	REKLAS	8,445,000.00	Reklas + dari Meubelair Rp 1.620.000 Reklas + dari Alar Rumah Tangga Lainnya Rp 6.825.000
TOTAL			317,459,200.00	

MUTASI KURANG

KIB	Barang Inventaris	Jenis Mutasi	Mutasi	Keterangan
B	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	REKLAS	6,245,000.00	Reklas - ke Meuble Rp 6.245.000
B	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	REKLAS	300,600,000.00	Rekla - ke Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 300.600.000
B	MEUBELAIR	REKLAS	1,620,000.00	Reklas - ke Ekstrakom Rp 1.620.000
B	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	REKLAS	6,825,000.00	Reklas - ke Ekstrakom Rp 6.825.000

RB	RUSAK BERAT	REKLAS	350,112,334.00	Reklas + dari kendaraan bermotor khusus Rp 350.112.334 (030/836/DISPURSIP/VIII/2023)
TOTAL			665,402,334.00	

3.1.5.3 Aset Lainnya

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset lainnya	65.022.338,99	147.762.734,99

3.1.6 Kewajiban

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kewajiban	0,00	00,0

Saldo Kewajiban 2023 Rp0,00.-

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1. Kewajiban Jangka Pendek	0,00	00,0

Saldo Kewajiban Jangka Pendek 2023 adalah sebesar Rp0,00.-

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang 2023 adalah Sebesar Rp0,00.-

3.1.7. Ekuitas Dana

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas	13.109.675.681,09	8.032.255.781,09

Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	13.109.675.681,09	8.032.255.781,09
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

3.1.7.1. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
EKUITAS AWAL	8,032,255,781.09	6,663,255,160.19
SURPLUS/DEFISIT-LO	204,203,307.00	-3,591,494,025.10
RK PPKD	4,873,216,593.00	6,139,697,978.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi ekuitas lainnya		-1,179,203,332.00
EKUITAS AKHIR	13,109,675,681.09	8,032,255,781.09

3.2. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Dalam penerapan basis akrual, DISPURSIP Kota Palangka Raya membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Berikut Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas DISPURSIP Kota Palangka Raya:

3.2.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.663.255.160,19 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.032.255.781,09.

3.2.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 adalah Surplus sebesar (Rp3.591.494.025,10) dan Surplus Rp204.203.307,00.

3.2.3. Koreksi Ekuitas

Akun koreksi ekuitas sebagai pengurang/penambah nilai ekuitas pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Surplus (Defisit) LO	Koreksi Ekuitas	RK/PPKD	Ekuitas
Saldo Awal Per 31 Desember 2023				8.032.255.781,09
Defisit LO per 31 Desember 2023	204.203.307,00			
RK PPKD			4.873.216.593,00	
Koreksi Nilai Persediaan		0,00		
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00		
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	204.203.307,00	0,00	4.873.216.593,00	13.109.675.681,09

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 58 Tahun 2021.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
6. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Pemerintah Kota Palangka Raya.
10. Uraian Tugas adalah uraian tugas Jabatan Struktural Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

11. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi
12. Kelompok sub-subtansi adalah wilayah kerja sub koordinator untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang selaras dengan tugas dan fungsi atasan langsungnya
13. Tugas adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab sesedorang.
14. Uraian Tugas adalah paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu Satuan Kerja Organisasi Negara.
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara.
17. Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah paparan tugas jabatan pemangku jabatan struktural dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
18. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan tugas jabatan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- (3) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditetapkan dengan tipe C, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Perpustakaan;
- d. Bidang Kearsipan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya;
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menetapkan pedoman, petunjuk teknis berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intern, kegiatan pada bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. menyelenggarakan, monitoring dan mengevaluasi program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya;
 - f. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intern;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya berdasarkan tugas yang diberikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2023 dengan catatan-catatan penting yang tertuang di dalamnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalah pahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KOTA PALANGKA RAYA



YOHAN BENHUR GOHAN PANGARIBUAN, A.P
NIP. 197512191994021001